

Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat

Leonard Ferdinand Sihite^{1*}, Safri Nurmantu²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹s.ferdinandleonard@gmail.com, ²safri@stiami.ac.id;

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 12, 2025

Revised : Maret 17, 2025

Accepted : Maret 27, 2025

Keywords:

Kepemimpinan RT dan RW;

Tertib Administrasi;

Administrasi Kependudukan.



Copyright (c) 2025

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

ABSTRACT

Penelitian ini tentang Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. RT dan RW merupakan salah satu elemen penting dalam tertib administrasi kependudukan. Pembentukan RT dan RW memiliki tujuan untuk melestarikan dan memelihara nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan pada kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di dalam lingkungannya. Selain itu RT dan RW memiliki tugas membantu Lurah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan pemerintahan. Salah satu dari tugas RT dan RW yaitu penyediaan data kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan warga masyarakat di lingkungannya, dimana pelaksanaan tugas RT dan RW tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana RT dan RW memimpin lingkungannya. Menggunakan teori Kepemimpinan dari Schermerhorn, dengan indikator teori kepemimpinannya yaitu: (1) Memiliki strategi yang jelas; (2) Kepedulian kepada anggota organisasi; (3) Memotivasi anggota organisasi; (4) Menjaga kekompakan tim; (5) Menghargai perbedaan dan keyakinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepemimpinan dari RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan sudah dinilai mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Para Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan telah menunjukkan beberapa upaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan secara rutin, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu mereka juga responsif untuk membantu warga yang menemui hambatan pada saat mengurus dokumen administrasi kependudukan. Namun, terdapat beberapa warga yang masih belum berpartisipasi aktif dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan walaupun telah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

PENDAHULUAN

Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai bagian dari Ibu Kota Indonesia dan pusat pemerintahan di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas kepada warga masyarakat yang tinggal, bekerja, atau berkunjung ke wilayah ini. Selain itu, posisi strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadikannya sebagai unsur penting dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Untuk memastikan pelayanan publik terselenggara dengan baik dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat, dibutuhkan kepemimpinan dan administrasi yang akurat dan terorganisir dengan baik, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Pengelolaan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang mencakup proses identifikasi, pengelolaan, serta pemanfaatan informasi kependudukan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam pengelolaan tertib administrasi kependudukan akan memastikan bahwa negara mempunyai data dan akses yang adil dan setara terhadap berbagai layanan publik.

Data kependudukan yang tertib dan akurat diperlukan tidak hanya untuk keperluan perencanaan pembangunan, namun juga untuk menjamin hak dasar bagi masyarakat seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan Pemilu. Administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia, namun sangat disayangkan tingkat kesadaran masyarakat maupun pemerintah masih rendah akan pentingnya tertib administrasi kependudukan (Nurwati, 2021).

Administrasi kependudukan perlu ditata dan juga ditertibkan mulai dari mencatat, mengolah hingga melaporkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, petugas dan pemerintah. Peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelengkapan serta validnya data yang ada. Data harus dicatat secara lengkap dan disimpan agar terjamin keamanannya (Indatriani & Adriadi, 2019).

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan prinsip utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam era modern, konsep *Good Governance* tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah, tetapi juga bagi organisasi sektor publik dan swasta dalam mengelola sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Pada tahun 1990-an, Bank Dunia menjadi lembaga internasional pertama yang mengadopsi konsep tata kelola yang baik ke dalam pengaturan pinjaman bagi negara-negara berkembang dan memperkenalkan gagasan tersebut kepada masyarakat umum. Dalam laporannya tahun 1992 yang berjudul “*Governance and Development*”, dituliskan pengertian *good governance* sebagai cara kekuasaan digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. Terdapat beberapa perbandingan antara Prinsip-prinsip *good governance* yang hampir dengan *good administration*. Berikut disajikan table perbandingan antara *good governance* dan *good administration*.

Tabel 1.1
Perbandingan Antara *Good Governance* dan *Good Administration*

No.	<i>Good Governance</i>	<i>Good Administration</i>
1	<i>Participation</i> atau Partisipasi	<i>Participation</i> atau Partisipasi
2	<i>Consensus oriented</i> atau Berorientasi pada konsensus	Tidak ada dimensi yang hampir sesuai dengan dimensi tersebut.
3	<i>Accountability</i> atau Akuntabilitas	<i>Accountability</i> atau Akuntabilitas
4	<i>Transparency</i> atau Transparansi	<i>Transparency</i> atau Transparansi
5	<i>Responsiveness</i> atau Responsivitas	Tidak ada dimensi responsivitas dalam dimensi tertib administrasi.
6	<i>Effectiveness and efficiency</i> atau Efektivitas dan Efisiensi	<i>Effectiveness</i> atau Efektivitas
7	<i>Equity and inclusiveness</i> atau Kesenjangan dan Inklusivitas	Menghargai perbedaan dan keyakinan
8	<i>Rule of law</i> atau Supremasi Hukum	<i>Justice</i> atau Keadilan
9	<i>Strategic Vision</i> atau Visi Strategis	Memiliki strategi yang jelas.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024.

Pada tabel tersebut terdapat beberapa prinsip yang sama antara *good governance* dan *good administration*. Sebagai program dari World Bank tentu saja *good governance* jauh lebih sempurna, dimana seluruh dunia telah menerapkan prinsip dari *good governance* tersebut dalam ke pemerintahannya. Indonesia berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang telah menerapkan prinsip dari *good governance*. Dari tabel diatas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang ada dengan *good governance*. Tertib administrasi atau *Good administration dan good governance memiliki persamaan dalam hal prinsip-prinsipnya, seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum*. Selain itu terdapat perbedaan yang ada, yaitu dalam *good administration* atau tertib administrasi tidak terdapat prinsip *consensus oriented* dan *responsiveness*, sedangkan di dalam *good governance* terdapat prinsip tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan administrasi kependudukan, pelaksanaan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selama ini dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat dengan lingkupnya masing-masing. Sebagai garda terdepan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pengurus RT dan RW bertanggung jawab untuk mendata, memverifikasi, dan melaporkan perubahan data kependudukan di lingkungannya. Mereka menjadi penghubung antara warga dengan instansi pemerintah, seperti Kelurahan dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, perkawinan, dan surat pindah. Dalam pelaksanaan tugasnya, RT dan RW bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data kependudukan warga di wilayahnya dikelola dengan tepat, termasuk mengumpulkan data mengenai kependudukan dengan akurat dan terbaharui. Pengelolaan data kependudukan di lingkup RT dan RW ini mencakup pendaftaran penduduk baru, mutasi data, serta verifikasi informasi kependudukan. Keberhasilan administrasi kependudukan di Tingkat Kelurahan sangat bergantung pada kepemimpinan RT dan RW yang akan mempengaruhi efektivitas tertib administrasi kependudukan dan data kependudukan yang dihasilkan.

Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan ini memiliki RT dan RW sebanyak 4533 RT dan 386 RW, tentunya dengan demografi dan kondisi wilayah yang berbeda antara Kecamatan dan Kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu Kecamatan yang menjadi bagian penting dari Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Kecamatan Gambir yang merupakan pusat lokasi dari pemerintahan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga dan instansi pemerintah yang berada di wilayah ini, seperti Istana Negara, kantor Kementerian, dan Lembaga Pemerintah lainnya.

Tabel 1.2

Jumlah RT dan RW di Kecamatan Gambir

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Gambir	Gambir	12	3
		Petojo Selatan	84	8
		Kebon Kelapa	49	4
		Cideng	113	10
		Petojo utara	98	8
		Duri Pulo	96	7
SUBTOTAL			452	40

Sumber: Bagian Pemerintahan Setko Adm Jakarta Pusat, 2023.

Kecamatan Gambir memiliki 6 Kelurahan dengan jumlah RT sebanyak 452 dan RW sebanyak 40. Dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan, Pengurus RT dan Pengurus RW di wilayah Kecamatan Gambir mempunyai peranan strategis dalam memelihara dan meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan. Kualitas pengurus RT dan RW sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang melakukan pelayanan langsung dalam masyarakat akan ikut menentukan tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan dan data administrasi kependudukan yang dihasilkan. Kelurahan Petojo Selatan merupakan Kelurahan di Kecamatan Gambir yang merupakan Ibukota Kecamatan Gambir. Sebagai pusat administratif Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan memiliki tugas yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi kependudukan warga masyarakatnya. Namun, masih terdapat beberapa keluhan atau pengaduan dari masyarakat wilayah

tersebut dalam hal pengurusan dokumen tertib administrasi kependudukan seperti pengurusan pelayanan KTP dan pelayanan dari RT dan RW yang masih belum maksimal. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat masih kurang karena belum terlalu paham mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dengan berbagai dinamika sosial yang terjadi di wilayah ini, peran pengurus RT dan RW di Petojo Selatan menjadi semakin vital dalam menjaga kelancaran dan ketertiban administrasi kependudukan.

Sebagai pelayan warga masyarakatnya, kepemimpinan RT dan RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pengurus RT dan RW bertanggung jawab langsung terhadap tertib administrasi kependudukan, mulai dari pendataan penduduk hingga pelayanan administrasi lainnya. Kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pengurus RT dan RW sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diterima oleh warga, sekaligus menentukan sejauh mana Kelurahan ini dapat menjaga ketertiban dan kelancaran administrasi di tingkat bawah. Oleh karena itu, pengurus RT dan RW di Petojo Selatan tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus dapat dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi warga masyarakatnya. Pada dasarnya, dokumen mengenai administrasi kependudukan merupakan catatan tertulis dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk fisik, bentuk cetakan, maupun bentuk digital, yang memuat berbagai informasi tentang individu sejak lahir hingga meninggal.

Tabel 1.3

Data Cakupan Tertib Administrasi Kependudukan Kelurahan Petojo Selatan

Data Cakupan KTP EL:

JUMLAH PENDUDUK (WAJIB KTP)	JUMLAH PEREKAMAN KTP	%	JUMLAH PEREKAMAN KTP + COKLIT NON AKTIF	%
13907	13709	98,58%	13906	99,99%

Data Cakupan KIA (Kartu Identitas Anak):

JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 17 TAHUN	JUMLAH CETAK KIA	%	JUMLAH CETAK KIA + COKLIT	%
4371	4265	97,57%	4367	99,91%

Data Cakupan Akta Lahir:

JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA LAHIR	%	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA LAHIR + COKLIT	%
4586	4551	99,24%	4586	100%

Data Cakupan Akta Perkawinan:

JUMLAH PENDUDUK KAWIN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA KAWIN	%	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA KAWIN + COKLIT	%
7911	6818	86,18%	7444	94,1%

Data Cakupan Akta Cerai:

JUMLAH PENDUDUK CERAI	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA CERAI	%	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA CERAI + COKLIT	%
399	295	73,93%	368	92,23%

Sumber: Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Petojo Selatan, Desember 2023.

Tabel 1.4

Data Cakupan Tertib Administrasi Kependudukan Kelurahan Gambir

Data Cakupan KTP EL:				
JUMLAH PENDUDUK (WAJIB KTP)	JUMLAH PEREKAMAN KTP	%	JUMLAH PEREKAMAN KTP + COKLIT NON AKTIF	%
2272	2272	100%	2272	100%
Data Cakupan KIA (Kartu Identitas Anak):				
JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 17 TAHUN	JUMLAH CETAK KIA	%	JUMLAH CETAK KIA + COKLIT	%
569	569	100%	569	100%
Data Cakupan Akta Lahir:				
JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA LAHIR	%	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA LAHIR + COKLIT	%
633	633	100%	633	100%
Data Cakupan Akta Perkawinan:				
JUMLAH PENDUDUK KAWIN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA KAWIN	%	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA KAWIN + COKLIT	%
1332	1332	100%	1332	100%
Data Cakupan Akta Cerai:				
JUMLAH PENDUDUK CERAI	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA CERAI	%	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA CERAI + COKLIT	%
207	207	100%	207	100%

Sumber: Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Gambir, Desember 2023.

Data tentang administrasi kependudukan dari dua Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gambir yaitu Kelurahan Petojo Selatan dan Kelurahan Gambir, dimana tabel tersebut dapat menunjukkan efektivitas sebagai salah satu dimensi dari tertib administrasi atau *good administration*. Dapat dilihat bahwa angka tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gambir lebih tinggi dibandingkan dengan Kelurahan Petojo Selatan meskipun dua wilayah Kelurahan ini saling berbatasan dan memiliki jarak yang sangat berdekatan. Dari dua data tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di wilayah Kelurahan Gambir sudah mencapai 100%, sedangkan Kelurahan Petojo Selatan belum mencapai 100%. Oleh karena itu, peneliti menjadikan Wilayah Kelurahan Petojo Selatan sebagai lokus penelitian karena belum tercapainya 100% angka tertib administrasi kependudukan.

Sebagai bagian dari Kecamatan Gambir, Wilayah Kelurahan Petojo Selatan memiliki demografi dan kondisi wilayah yang cukup bervariasi dan juga kebutuhan administrasi yang kompleks. Dengan demikian, RT dan RW di Kelurahan Petojo Selatan tentunya menghadapi hambatan yang berbeda-beda dalam mewujudkan pengelolaan data yang tepat, sistem administrasi yang efisien, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang tertib. Dinamika sosial di Kelurahan Petojo Selatan, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Masih ditemukannya data-data kependudukan yang belum dilaporkan dan diperbaharui dapat menunjukkan bahwa warga masyarakat, Pengurus RT, dan Pengurus RW di Kelurahan Petojo Selatan belum seluruhnya menyadari akan pentingnya pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib di wilayahnya. Pengurus RT dan Pengurus RW yang pada hakekatnya adalah pemimpin di lingkup wilayahnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap data penduduk tercatat dengan akurat dan *terupdate*. Sebagai pemimpin yang berada di tingkat terbawah yang berada di masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW memiliki tugas untuk mendata setiap perubahan status kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, atau perubahan status pernikahan. Pencatatan yang tepat waktu dan akurat di Tingkat RT dan RW akan menjadi dasar bagi administrasi kependudukan yang lebih besar, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, atau kartu keluarga. Tanggung jawab dilakukan untuk memastikan bahwa data kependudukan dapat disinkronkan dan diverifikasi kebenarannya merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya kesalahan data yang dapat berdampak kepada pelayanan publik.

Pengelolaan data yang tidak akurat atau keterlambatan dalam proses administrasi dapat berdampak pada berbagai aspek layanan publik penting lainnya, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Tinggi atau rendahnya kualitas tertib administrasi kependudukan ini tidak terlepas dari kemampuan RT dan RW dalam memimpin wilayah dan warganya. Oleh karena itu kepemimpinan Ketua RT dan Ketua RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dapat

sangat menentukan kualitas dan efektivitas layanan publik di Tingkat Kelurahan, sehingga perlu dievaluasi secara mendalam. Menurut Robbins dalam (Ajeng, 2022) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional pada dasarnya menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Pada penelitian ini, gaya kepemimpinan transformasional cocok digunakan oleh RT dan RW untuk dapat mempengaruhi serta mengarahkan warganya dalam membangkitkan dan meningkatkan partisipasi warga dalam tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian, kemampuan kepemimpinan RT dan RW tersebut dapat membentuk partisipasi aktif masyarakat untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan dengan mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh RT dan RW.

Minimnya aspek-aspek yang ada seperti kepemimpinan, komunikasi, kemampuan penyelesaian masalah, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat yang dimiliki Pengurus RT dan RW dinilai dapat menjadikan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan menjadi kurang maksimal dan kurang obyektif. Hal ini sering terlihat adanya masyarakat yang menunggu terlalu lama dalam pengurusan administrasi kependudukannya, bahkan dilempar kesana kemari dalam mencari informasi. Kondisi ini dikarenakan masih adanya Pengurus RT dan RW yang kurang proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hal ini menyebabkan layanan prima tidak terpenuhi sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam kepemimpinan RT dan RW di bidang administrasi kependudukan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. Peneliti melakukan penelitian yang akan dipusatkan di Wilayah Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul **“Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat”**.

KAJIAN LITERATUR

1. Kepemimpinan : Menurut Schemerhorn (dalam Nazariah dkk, 2022) “Kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja guna menyelesaikan tugas-tugas penting yang telah diberikan.
2. Tertib Administrasi : Menurut data elektronik, *“Good administration is the practices of managing affairs in a way that is fair, open, and accountable. It also involves being customer-focused and seeking continuous improvement.”*
3. Evaluasi : Menurut Wiliam Dunn (dalam Ridho, 2021) “Evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan responsivitas didalamnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong dalam Fajar, 2022). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan proses penyeledikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang sebuah fenomena, fokus dan multi metode, memiliki sifat holistik dan alami serta mengutamakan kualitas dengan menggunakan berbagai cara dan disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019).

Lebih lanjut Creswell mengatakan Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik yang didapat melalui pengalaman langsung, pemberitaan yang jujur, dan kutipan percakapan aktual. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana partisipan memperoleh makna dari lingkungan sekitar mereka, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti dapat menganalisis dan mengetahui bagaimana kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan memperoleh informasi-informasi baik dari informan, buku, maupun media lainnya untuk mengetahui mengenai keadaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini berfokus pada Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan. Analisis dilakukan menggunakan teori dari Schemerhorn yang terdiri dari lima indikator, yaitu : (1) Memiliki strategi yang jelas, (2) Kepedulian kepada anggota organisasi, (3). Memotivasi anggota organisasi, (4) Menjaga kekompakan tim dan (5) Menghargai perbedaan dan keyakinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui mengenai kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan telah menunjukkan beberapa upaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan secara rutin, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu mereka juga responsif untuk membantu warga yang menemui hambatan pada saat mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Penelitian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan dari para Ketua RT dan Ketua RW yang ada di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Kepemimpinan yang dimiliki dari masing-masing Ketua RT dan Ketua RW yang ada memiliki peran penting dalam memastikan warganya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Akan tetapi, bukti empiris menunjukkan bahwa masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Terdapat beberapa warga yang masih belum berpartisipasi aktif dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan walaupun telah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Fokus penelitian ini adalah kepemimpinan para Ketua RT dan Ketua RW yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan dengan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen tertib administrasi kependudukan. Para Ketua RT dan Ketua RW yang ada sebaiknya melakukan pertemuan yang lebih rutin dan memberikan informasi yang mudah dipahami serta relevan dengan tertib administrasi kependudukan supaya dapat berkomunikasi dengan efektif dengan para warga.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan yang melibatkan perangkat Kelurahan termasuk Kepala Seksi Pemerintahan dan Kasatpel Dukcapil Kelurahan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini kepemimpinan para Ketua RT dan Ketua RW sangat memiliki peran yang penting dan kolaborasi dalam meningkatkan pemahaman dari para warganya mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Pembahasan

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian mengenai kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan dengan berpedoman pada teori Schermerhorn dan literatur. Analisis dilakukan secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan saran berdasarkan bukti yang empiris.

Teori Kepemimpinan Schermerhorn menjelaskan lima indikator yang mempengaruhi Kepemimpinan RT dan RW, yaitu memiliki strategi yang jelas, kepedulian kepada anggota organisasi, memotivasi anggota organisasi, menjaga kekompakan tim dan menghargai perbedaan dan keyakinan. Evaluasi Kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjukkan: (1) **Memiliki Strategi Yang Jelas** : Telah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang tertib. Selain itu, para Ketua RT dan RW juga menyediakan berbagai informasi terkait administrasi kependudukan melalui papan pengumuman dan media sosial agar mudah diakses langsung oleh warga. (2) **Kepedulian Kepada Anggota Organisasi** : Para Ketua RT dan RW telah mengingatkan warganya mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Selain itu, Para Ketua RT dan RW juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mempermudah proses administrasi bagi warga. (3) **Memotivasi Anggota Organisasi** : Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Petojo Selatan memberikan penghargaan atas kinerja mereka, walaupun reward dari saya tidak seberapa nilainya tapi dengan reward tersebut mereka akan termotivasi untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah RT dan RW masing-masing. (4) **Menjaga Kekompakan Tim** : Para Ketua RT dan Ketua RW harus mampu untuk menjalin hubungan yang baik dan saling percaya dengan warganya. Dengan seperti itu, mereka akan lebih mudah untuk mengajak warganya dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. (5) **Menghargai Perbedaan dan Keyakinan** : Para Ketua RT dan Ketua RW sangat menghargai keragaman yang ada di lingkungan, baik itu perbedaan agama, budaya, maupun keyakinan. Mereka akan memastikan setiap kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan disampaikan secara inklusif, tanpa memandang latar belakang warga.

Analisis Kendala dan Hambatan terkait Penyebab Hambatan berdasarkan indikator teori Schermerhorn : (1) **Memiliki Strategi Yang Jelas** : Masih banyak warga yang kurang memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. (2) **Kepedulian Kepada Anggota Organisasi** : Pada awal proses mengurus dokumen tertib administrasi kependudukan banyak warga yang mengalami kebingungan terkait prosedur dan alur dalam proses mengurus dokumen tertib administrasi kependudukan. (3) **Memotivasi Anggota Organisasi** : Para Ketua RT dan Ketua RW terkadang tidak mempedulikan reward tersebut karena mereka sudah memiliki pekerjaan tetap diluar pekerjaan mereka sebagai Ketua RT dan Ketua RW dan juga reward yang mereka terima tidak seberapa. (4) **Menjaga Kekompakan Tim** : Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Ketua RT dan Ketua RW dengan warga atau pengurus lainnya. Itu bisa menyebabkan kesalahan informasi yang diberikan kepada warga. (5) **Menghargai Perbedaan dan Keyakinan** : Dalam pelaksanaannya masih ada warga yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda dan menyebabkan ketidaksetujuan terkait dengan pemahaman pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Analisis Upaya Menghadapi Hambatan dalam Kepemimpinan RT dan RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan yang telah diterapkan antara lain sebagai berikut : (1) Mengadakan pelatihan dan sosialisasi serta edukasi yang rutin, memperkuat komunikasi melalui pertemuan berkala, serta memberikan dukungan teknis terkait penggunaan aplikasi administrasi yang lebih efisien. (2) Memastikan setiap prestasi atau kemajuan dalam pengelolaan administrasi diakui dan dihargai yang baik. Dengan menciptakan komunikasi yang baik, memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan mengapresiasi kinerja mereka, Para Ketua RT dan Ketua RW akan lebih termotivasi dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di wilayahnya. (3) Memastikan adanya dukungan penuh dari pihak kelurahan dalam hal koordinasi dan penyelesaian hambatan yang ada di lapangan, agar mereka merasa terbantu dan mereka merasa menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen tertib administrasi kependudukan.

Kepemimpinan RT dan RW telah berjalan dengan dukungan dari pihak Kelurahan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi seperti kurangnya komunikasi yang efektif antara Ketua RT dan Ketua RW dengan warganya yang dapat menyebabkan kesalahan informasi yang diberikan.

Hambatan utama yang ada masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya dokumen tertib administrasi kependudukan. Para Ketua RT dan Ketua RW telah mengupayakan solusi dengan mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya dokumen tertib administrasi kependudukan. Namun hal tersebut masih harus didukung dengan komunikasi yang lebih efektif.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan mempunyai andil yang cukup besar pada meningkatnya tertib administrasi kependudukan, walaupun pada pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Dengan melakukan peningkatan komunikasi menjadi lebih efektif, memberikan pemahaman yang lebih dimengerti oleh warga mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan, hal tersebut bisa menjadi solusi yang tepat untuk dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian mengenai kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini : (1) Para Ketua RT dan Ketua RW telah melakukan berbagai upaya dalam proses meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak menemui hambatan dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Ini terlihat dari masih adanya sebagian warga di wilayahnya masing-masing belum memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan, hal tersebut disebabkan oleh belum rutinnya dilaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan, hanya di beberapa wilayah RT dan RW saja yang sudah melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan rutin untuk memberi informasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. (2) Hambatan utama dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan ini meliputi Masih banyak warga yang kurang memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu komunikasi yang belum efektif antara Ketua RT dan Ketua RW dengan warga atau pengurus lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi. Dalam pelaksanaan program tersebut, masih ada warga yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda dan menyebabkan ketidaksetujuan terkait dengan pemahaman pentingnya tertib administrasi kependudukan. (3) Para Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan telah menunjukkan beberapa upaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan secara rutin, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu mereka juga responsif untuk membantu warga yang menemui hambatan pada saat mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Kesimpulan ini memberikan gambaran mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan serta dapat memberikan saran untuk meningkatkan kualitas komunikasi supaya lebih efektif dan memberikan sosialisasi atau edukasi yang rutin dengan menggunakan informasi yang lebih mudah dimengerti oleh warga mengenai tertib administrasi kependudukan sebagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, W., Rio, U., Muzawi, R., Nasution, T., & Haryono, D. (2021). Penguatan Pengelolaan Website Desa Untuk Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Baru Rokan Hulu. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1(1), 8-17.
- Akbar, A. G., Effendy, K., & Lukman, S. (2021). Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Aplikasi LAPOR! di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Medium*, 9(2), 276-291.

- Aminullah, A. (2024). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SENGONAGUNG KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(5), 51-60.
- Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1413-1432.
- Diana Santy, N. W. (2021). Citra Perusahaan Garuda Indonesia: Persepsi Para Loyalis Garuda Indonesia (Doctoral dissertation, STTKD Sekolah Tinggi Teknologi Kerdigantaraan Yogyakarta).
- Farida, Y., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 961-972.
- Firmansyah, I. (2024). EFEKTIVITAS KERJA DALAM PENDATAAN PENONAKTIFAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI NIK WARGA JAKARTA: PERAN KERJA PETUGAS DASAWISMA. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 8(3), 41-50.
- Hartati, S. (2022). Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada E-Office Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 81-93.
- Hasyanita, A. N., & Mayangsari, I. D. (2022). Analisa Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Alat Komunikasi Pemasaran Eboni Watch. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1096-1102.
- Hulu, J. M. (2021). Pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Mazo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal ilmiah mahasiswa nias selatan*, 4(2).
- Indatriani, R., & Adriadi, R. A. (2019). Optimalisasi Tertib Administrasi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 1(1), 16-26.
- Isti'anah, S. N., & Arif, L. (2023). Efektivitas Program KALIMASADA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kendangsari. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 171-178.
- Lestari, W. (2024). EFEKTIVITAS LAYANAN DAFTAR DI RUMAH DOKUMEN TERBIT BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO KUALA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Manggarani A. Cynthia., Patiro P.S. Shine., Siswanto J. Dwi & Budiyaniti Hety (2020). KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN PUBLIK. Yogyakarta : Pohon Cahaya.
- Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal).
- Nadila, I. A., & Aminah, S. (2024). Efektivitas Pelayanan Jasa Melalui Program Kalimasada Untuk Meningkatkan Kesadaran Administrasi Kependudukan di Kelurahan Sidosermo. *PADMA*, 4(1), 82-93.
- Ndruru, F., Zega, Y., Mendrofa, Y., Waruwu, E., & Halawa, F. (2023). Analisis Loyalitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 6854-6867.
- Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(1), 215-228.

- Pae, N. T., Hasbullah, H., Kurnia, I., & Nuraisyah, N. (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 439-448.
- Riza, M. S. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.
- Sahadi, S., Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter kepemimpinan ideal dalam organisasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 513-524.
- Setiani, A. (2020). Efektivitas Proses Belajar Aplikasi Zoom di Masa Pandemi dan Setelah Pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 3, No. 1, pp. 523-530).
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, K., Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., ... & Lestari, H. (2023). Metodologi Penelitian Kuantitatif.
- Sono, N. H. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kiai Dan Kepuasan Gaji Terhadap Kinerja Umana'Di Lingkungan Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 15(2), 325-340.
- Subagyo, A. (2020). Aplikasi metode riset: praktik penelitian kualitatif, kuantitatif & Mix methods. *Inteligencia Media*.
- Sumartini, R. S., Arifin, J., Abas, S., & Nursidi, D. (2024). IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM KONSEP NEGARA HUKUM. *Yustitia*, 10(1), 16-30.
- Wardhani, A. A., & Wikartika, I. (2024). Efektivitas Transformasi Pelayanan: Meningkatkan Kesadaran dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Wonorejo, Rungkut. *Journal Of Human and Education (JAHE)*, 4(1), 400-406.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Wekke, I. S. (2019). Metode penelitian sosial. *Yogyakarta: Gawe Buku*, 87.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17-28.
- Yoga, A. S. (2019). *Efektivitas Layanan E-Samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau (Studi Kasus Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Zulfikri, Z., & Abdul, N. (2020). *Efektivitas Peran Account Representative Dalam Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah* (Doctoral dissertation, Universitas Bina Darma).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.